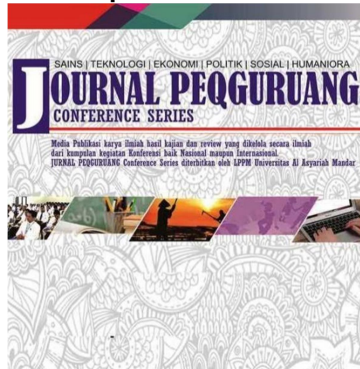


Graphical abstract



AKSES DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI TATA KEPEMERINTAHAN LOKAL DEMOKRATIS DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DAN LAUT

Syamsu Alam
Universitas Al Asyariah Mandar

Corresponding author
syamsualam39@yahoo.com

Abstract

Indonesia's marine resources are the richest in the world. However, national statistics also clearly note that the poorest population of the country is still dominated by fisherman-earning communities. After the end of the era of the New Order government, there has been a change in the development paradigm from priorities focused on land to priorities focused on the sea. Even when the bells of Democratic Local Governance began to be initiated and socialized in Indonesia, marking a better start. Various development approaches, including community-based approaches are still not optimal and many fail. Continuing with that, active participation led by local communities which should be the basic color in all the process of the action program up to now has become mere rhetoric. So the best-selling alternative solutions lately discussed are Community-Based Management (PBM) and Democratic Local Governance (TKLD) approaches which are considered to be able to touch the essence of the real problem.

Keywords: *Government, Democratic, Coastal and Marine Regions.*

Abstrak

Sumberdaya laut Indonesia merupakan yang terkaya di dunia. Namun demikian, angka statistik nasional juga mencatat dengan jelas bahwa penduduk termiskin yang dimiliki negeri ini masih didominasi masyarakat yang bermata pencaharian nelayan. Setelah berakhirnya era pemerintahan orde baru, telah terjadi perubahan paradigma pembangunan dari prioritas yang berfokus di daratan ke prioritas yang berfokus di kawasan laut. Bahkan ketika lonceng Tata Pemerintahan Lokal Demokratis mulai diinisiasi dan disosialisasikan di Indonesia, menandai dimulainya lebih baik. Berbagai pendekatan pembangunan, termasuk pendekatan yang berbasis masyarakat masih belum optimal dan banyak mengalami kegagalan. Sinambung dengan itu, partisipasi aktif yang dipimpin masyarakat lokal yang mestinya menjadi warna dasar dalam semua proses program aksi hingga kini menjadi retorika belaka. Maka solusi alternatif yang paling laris dibicarakan akhir-akhir ini adalah Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM) dan pendekatan Tata Pemerintahan Lokal Demokratis (TKLD) yang dinilai dapat menyentuh esensi permasalahan yang sebenarnya.

Kata kunci: *Pemerintahan, Demokratis, Kawasan Pesisir dan Laut*

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v1i2.559>

Received : 1 Agustus 2019 | Received in revised form : 24 September 2019 | Accepted : 1 Oktober 2019

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, kontroversi antara pembangunan dan lingkungan hidup cenderung dipersepsi sebagai variabel yang mutlak terjadi. Terutama dalam kaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Kesan demikian itu dilatari suatu fakta dimana pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam selama ini, dominan atas pertimbangan ekonomi dan mengabaikan kepentingan kelestarian dan keberlanjutan ekosistem lingkungan ekologi dan sosialnya.

Dalam berbagai praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, terlihatlah kawasan hutan dirajam secara sadis, potensi tambang dikuras habis dan lahan-lahan rakyat dieksploitasi tanpa kontrol serta kawasan laut dijadikan tong sampah. Potensi sumberdaya alam diberbagai tempat mengalami degradasi yang memprihatinkan. Hal itu ditandai pada musim hujan; banjir dan longsor terjadi pada hampir semua pelosok tanah air, sementara pada musim kemarau kebakaran hutan dan kekurangan air datang silih berganti.

Fenomena demikian itu menjadi contoh yang sangat transparan betapa kehadiran pembangunan justru memposisikan tatanan lingkungan dalam kondisi kritis. Tersebutlah potensi tambang seperti; Tembaga di Papua Barat, Nikel di Sulawesi, Emas di Kalimantan Timur, Uranium di Kalimantan Barat serta minyak dan gas di Sumatra (Aceh dan Jambi), semuanya menimbulkan permasalahan lingkungan. Akan halnya kondisi pesisir dan laut beserta sumberdaya hayatinya, juga porak-poranda hanya karena kepentingan sesaat yang bernama ekonomi. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah, ternyata pada lokasi sumberdaya alam yang dikelola melahirkan pula konflik-konflik sosial warga setempat yang hingga kini belum mendapat penanganan memadai.

Dampak lain dari proses pembangunan yang telah digulirkan terbukti pula bahwa kebijakan pengelolaan sumberdaya alam selama ini, pada gilirannya hanya melahirkan konglomerat-konglomerat yang oleh Pemerintah dijadikan sebagai strategi dalam menjangrnf mengalirnya dana-dana internasional. Bahkan dalam konteks politikekonomi pemerintah kelihatan sangat ketakutan dengan lembaga lembaga keuangan internasional, seperti IMF.

Sebetulnya sumberdaya alam Indonesia yang tersisah, masih tergolong banyak dan karenanya menjadi daya tarik investor asing untuk menanamkan modalnya dinegeri ini. Dari sisi ini, maka sesungguhnya Indonesia memiliki posisi tawar yang strategis. Dengan demikian, keraguan pemerintah atas larinya investor asing dari negeri ini termasuk ancaman IMF untuk tidak mencairkan bantuannya, menjadi tidak beralasan.

Dari situasi dan kondisi demikian, mendorong para akademisi dan ilmuan, praktisi lembaga swadaya masyarakat yang semakin menaruh perhatian terhadap masalah pengelolaan wilayah pesisir dan laut baik melalui seminar, lokakarya maupun melalui berbagai pelatihan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

. Urgensi dan Masalah Pengelolaan Lingkungan Laut.

Sejak pertengahan 1997 Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi, dan krisis itulah yang hingga saat ini masih membekas mencemaskan dan mempengaruhi kehidupan social politik di Indonesia. Saat ini kondisi perekonomian bangsa semakin kompleks sehubungan dengan fenomena globalisasi dan era perdagangan bebas yang menjadi cirri dominan millennium ketiga. Bahkan terkesan bahwa di era globalisasi dan perdagangan bebas, hanya bangsa yang dapat memproduksi barang dan jasa berdaya saing tinggilah yang dapat surviva serta menjadi maju dan mandiri (Rokhmin Dahuri, 2000 dalam M. Natsir Nessa dkk Prosiding Konferensi Nasional Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Indonesia, hal 38).

Dengan begitu, maka salah satu yang harus dipacu adalah sektor riil untuk menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi. Sektor riil yang paling potensial dapat membantu pemecahan krisis ekonomi adalah sektor pembangunan yang terdapat dikawasan pesisir dan laut yang meliputi; Perikanan, Kelautan, Pertanian, Pariwisata, Pertambangan dan energi. Perhubungan, industry maritime dan jasa-jasa lingkungan. Potensi ini sangat strategis untuk menghasilkan barang dan jasa untuk selanjutnya dijual, baik dipasar domestik maupun pasar global.

1.1. Masalah Kerusakan Fisik Habitat Ekosistem.

Pada prinsipnya, kerusakan fisik habitat meliputi ekosistem mangrove, Terumbu karang dan rumput laut. Kerusakan terumbu karang misalnya dilaporkan bahwa terumbu karang Indonesia yang masih berada dalam kondisis sangat baik hanya (6,20%), rusak (41,78i%0, sedang (28,30%) dan kondisi baik (23,72%).

1.2. Over eksploitasi Sumberdaya Hayati.

Walaupun secara umum sumberdaya perikanan laut baru dimanfaatkan sekitar 60% dari total potensi lestariannya, namun beberapa kawasan ternyata stok sumberdaya ikan telah melampaui ambang tangkap. Adapun kawasan laut yang mendapat tekanan-tekanan berat adalah; Pantai utara pulau Jawa, Laut Bali dan Selat Makassar.

Tingginya tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah- wilayah tertentu bukan hanya dilakukan oleh armada nelayan (perikanan) nasional, tapi juga dilakukan oleh nelayan asing. baik secara legal maupun illegal terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Bahkan dikawasan ZEEI ini menimbulkan permasalahan tersendiri karena para nelayan nasional tidak dapat melakukan penangkapan ikan secara memadai karena fasilitas yang sangat terbatas.

1.3. Pencemaran.

Secara umum kawasan laut Indonesia telah mengalami pencemaran, namun demikian yang mengalami pencemaran tergolong berat meliputi; Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa

Tengah, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Lampung dan Sulawesi Selatan.

1.4. Keterbatasan dana.

Dengan kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk, jelas berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan pesisir dan laut. Dengan adanya keterbatasan dana dan prasarana menyebabkan masyarakat pesisir dan laut memanfaatkan alam sekitarnya secara kurang bertanggung jawab. Pada sisi lain keterbatasan ini menyebabkan kurang terkelolanya secara efisien segala sumberdaya dikawasan pesisir laut sehingga menghambat lalu lintas perekonomian masyarakat yang memang sedang tertinggal jauh.

1.5. Rendahnya kualitas SDM

Salah satu masalah mendasar sekarang ini adalah bagaimana mengintegrasikan dan mendistribusikan semua disiplin ilmu yang terkait dalam berbagai sector dan juga kedaerah-daerah. Sementara masyarakat pesisir mempunyai tingkat kemampuan yang sangat rendah. Karena kurang terjadinya komunikasi yang intensif antara para pakar dengan masyarakat pesisir menyebabkan pembinaan keterampilan maupun pendanaan masyarakat pesisir kurang mengalami kemajuan yang berarti.

1.6. Kurangnya Koordinasi dan kerjasama antar Pelaku.

Egoisme sektoral telah mengorbankan kepentingan yang lebih besar berupa terbengkalainya perencanaan dan pemanfaatan kawasan pesisir dan laut secara bertanggung jawab dan berkesinambungan. Konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berkepentingan di kawasan laut masih selalu terjadi dan sering berlarut-larut yang menghambat produktifitas nasional.

Dengan demikian diera Otonomi Daerah hendaknya Pemerintah Daerah bersama DPRD merancang bangun Pengelolaan dan Pemanfaatan sumberdaya laut yang berbasis masyarakat. Semua daerah memiliki karakteristik dan asset based local yang bisa didayagunakan oleh masyarakat setempat untuk mengatur pengelolaan wilayahnya secara terpadu.

1.7. Lemahnya Penegakan Hukum.

Pada prinsipnya Indonesia adalah Negara hukum. Tapi makna hukum bagi rakyat praktis tidak terasa. Palsunya adalah pada tataran substansi dalam arti muatan-muatan hukum, praktis sangat lemah pemihakannya kepada rakyat. Akan halnya pada aspek struktural dalam arti lembaga penegakan hukum. Selain tidak konsisten juga sangat lemah kemampuan profesionalismenya. Budaya penataan hukum masyarakat masih sangat rendah.

Sebetulnya tujuan hukum meliputi 3 aspek yaitu: terciptanya rasa keadilan, Kemamfaatan dan Kepastain Hukum. Akan tetapi dalam prakteknya yang sering mendapat penekanan justru pada aspek kepastian hukum, sementara dimensi keadilan terabaikan. Dan yang memprihatinkan, banyak kasus-kasus yang justru aparat yang mestinya menegakkan aturan-aturan

hukum, justru menjadi pelaku tindak kriminal demi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya.

1.8. Kemiskinan Masyarakat pesisir dan laut.

Hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir masih tetap menyandang predikat sebagai segmen masyarakat yang paling miskin. Sementara itu, tingkat kerusakan kawasan pesisir dan laut telah tiba pada keadaan yang memprihatinkan. Betapa tidak, kegiatan industry dan kegiatan lain yang mencemari kawasan laut masih berlangsung terus menerus.

Memang benar bahwa kerusakan kawasan pesisir dan laut juga dilakukan oleh masyarakat miskin demi mempertahankan hidup mereka. Akan tetapi dalam kondisi begitu siapa yang harus disalahkan? Tentu saja tidak bijak, jika kesalahan demikian harus ditanggung oleh si miskin, pasalnya adalah kemiskinan pada umumnya hanyalah merupakan akibat dan kesalahan rancangan pembangunan yang tidak berkeadilan selama ini dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Oleh karena itu, harus selalu menjadi agenda penting agar masyarakat pesisir laut mendapat prioritas pengembangannya, yang meliputi semua aspek kehidupan, termasuk hak-hak politik yang sering terabaikan.

2. Pengelolaan Berbasis Masyarakat melalui Tata Kepemerintahan Lokal yang Demokrasi (TKLD).

Munculnya konsep Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM) dengan pendekatan TKLD adalah satu pendekatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan analisa kebutuhan semua pihak tanpa memandang gender dan social (laki, perempuan, miskin dan elit desa) dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Namun mempertimbangkan ketidak beruntungan yang selama ini terjadi pada kelompok miskin dan perempuan. jadi konsep PBM adalah visi yang bertujuan memposisikan rakyat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumberdaya alam dalam semua tahapan.

Dari aspek muatannya, PBM memiliki tiga pilar utama yaitu; pertama, berorientasi pada peningkatan ekonomi rakyat setempat. Kedua, berdasar pada sumberdaya lokal (SDM dan SDA) termasuk kearifan tradisional dan ketiga, kelestarian ekosistem sumberdaya alam tetap terjamin keberlanjutannya. Dengan demikian jika satu dari tiga pilar tidak tercapai dalam suatu pengelolaan sumberdaya alam, maka itu tidak termasuk dalam konsep PBM.

Untuk mencapai harapan dari konsep PBM tersebut, maka aspek akses dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam menjadi sangat penting. Dalam konsep TKLD, Partisipasi yang dimaksud bukan partisipasi yang dipaksakan (induced and invited participation), atau artifisial atau hanya sebatas aksesoris pembangunan, tetapi partisipasi di mana warga masyarakat datang untuk membangun ruangnya sendiri dan melakukan perubahan menurut strateginya sendiri (Cornwall,2000).

Menurut Dadang Solihin (2004), dalam konteks *governance*, masyarakat bukanlah sebagai klien (*client*) atau hanya penerima manfaat, melainkan sebagai warga (*citizen*). Masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah tetapi sebagai partner pemerintah dalam mengelolah pemerintahan dan pembangunan. Partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi sebagai hak warga masyarakat. Masyarakat bukan sekedar objek pasif penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor atau subyek yang aktif menentukan kebijakan. Bahkan, Cornwall (2000) menempatkan warga sebagai pihak yang dapat bertindak (*as the exercise of agency*), Pemaknaan kewargaan sebagai “pihak yang dapat bertindak” ini menjadi dasar dari sebuah pendekatan yang lebih inklusif dengan sejumlah hak yang dikembangkan oleh warga itu sendiri.

Praktik partisipasi sebagai hak, dan juga sebagai ruang/arena di mana warga dapat bertindak memiliki 3 subtansi penting, yaitu; *voice* (bersuara), *akses* dan *kontrol*. *Voice* yaitu; hak dan tindakan warga menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. *Akses* yaitu; ruang dan kapasitas warga untuk masuk dalam arena *government*, *yakni* mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Dan *Kontrol* yaitu; pengawasan warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses-politik yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Saat ini berbagai Skema Program terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut masuk didesa-desa. Supaya program-program tersebut efektif dan berhasil, maka harus memiliki 3 subtansi penting didalamnya yaitu (1) Warga dan organisasi warga yang berdaya, (2) hubungan atau interaksi aktif (*engagement*) antara warga dengan pemerintah (Negara) dan (3) meningkatkan hasil-hasil pembangunan.

1. Warga dan Organisasi Warga yang berdaya, adalah memiliki pemaknaan, penekanan dan pendekatan khusus terhadap; *Pertama*, konsep kewargaan (*citizenship*) terutama dalam mendorong upaya-upaya untuk memastikan terpenuhinya hak-hak sipil dan politik kewargaan dan keanggotaan dari sebuah komunitas / organisasi. Program harus memberi perhatian pada perempuan, orang miskin, dan kelompok marginal lainnya serta organisasi berbasis komunitas seperti; Community center, kelompok perempuan, kelompok tani, komite sekolah, kelompok peduli lingkungan, kelompok pemuda, dan organisasi masyarakat sipil lainnya (LSM). *Kedua*, Program berfokus pada pembangunan dan penguatan pada sisi warga masyarakat sipil (*demand side*). Hal ini didasari asumsi bahwa

pemerintah (Negara) akan bisa berubah semakin baik kalau tuntutan untuk peningkatan dalam tata pemerintahan yang lebih baik (lebih partisipatif, transparan, akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas dan pengakuan hak-hak sipil dan politik serta penegakan hukum secara adil. Tuntutan tersebut harus diartikulasikan dan diperjuangkan secara aktif, efektif dan terus menerus oleh warga masyarakat sipil sendiri. *Ketiga*, Program berfokus pada pemberdayaan (*empowerment*) warga dan organisasi mereka. Oleh Cornwall (2004), pemberdayaan merupakan proses yang membantu orang-orang yang dimarginalkan untuk mengenali dan menggunakan kemampuan mereka untuk bertindak dengan tujuan yang jelas dan pasti. Pemberdayaan menyangkut 3 aspek (3 O) penekanan; yaitu Otak, Organisasi dan Ongkos.

Pemberdayaan pada; Aspek Otak berkaitan dengan pembangunan dan penguatan kesadaran kritis dan pemahaman warga terhadap hak dan kewajibannya. Aspek Organisasi berkaitan dengan memfasilitasi terbentuk dan berfungsinya organisasi-organisasi warga untuk melayani kepentingan anggotanya dan mewadahi aspirasi mereka dalam berinteraksi dengan pihak lain untuk mendialogkan dan memperjuangkan pandangan (*views*) kepentingan (*interes*) mereka. Aspek Ongkos berkaitan upaya-upaya mendorong warga dan organisasi mereka untuk mengelola dan memobilisasi secara optimal sumber-sumber program pembangunan guna meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup dan mewujudkan kemandirian warga dan organisasinya.

2. Interaksi aktif (Engagement) antara masyarakat sipil dan pemerintah. Adalah menciptakan dan/atau membuka ruang/arena bagi warga dan organisasi sipil melakukan interaksi atau berhubungan dengan pemerintah (Negara). Karena itu dengan memberikan perhatian besar kepada penguatan kapasitas warga masyarakat sipil, bagaimana saluran partisipasi bisa terjangkau oleh kedua belah pihak, dan strategi jitu untuk meningkatkan dan memastikan berartinya *voice*, *akses* dan *kontrol* warga, khususnya perempuan, orang miskin dan kaum marginal lainnya kepada pembuatan kebijakan dan implementasinya.

Ada 4 ruang/arena kunci di mana masyarakat sipil bisa berinteraksi dengan pemerintah (Negara) untuk mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis, yaitu (1) memastikan partisipasi langsung warga dan organisasi warga dalam proses pembuatan kebijakan hingga pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. (2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, (3) memastikan pengelolaan pelayanan publik yang bermutu, serta (4) mengupayakan keadilan sosial dan penegakan hukum.

3. Meningkatkan hasil-hasil pembangunan.

Dengan berfokus pada pemberdayaan warga dan organisasi warga, serta mendorong interaksi dinamis masyarakat sipil dengan pemerintah dalam keseluruhan proses kebijakan (dari proses formulasi, proses pembuatan, implementasi, monitoring dan evaluasi) diharapkan pengelolaan kawasan pesisir dan laut bisa meningkatkan hasil-hasil pembangunan yang kemudian berkontribusi kepada pengurangan kemiskinan. Memang demokrasi atau Tata Kepemerintahan Lokal yang Demokratis (TKLD) tidak secara langsung mengurangi kemiskinan, apalagi membuat kenyang perut orang miskin seketika. Demokrasi secara teoritis, sering dibayangkan sebagai kondisi yang diperlukan bagi efektifitas pembangunan. Demokrasi, TKLD akan membuat aparat Negara lebih terbuka dan akuntabel sehingga lebih cepat tanggap dan bertanggung jawab (responsiveness) dan representative (representativeness) terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal (Betham 1996).

Pengurangan kemiskinan bukan berarti memberi santunan atau sedekah secara langsung kepada warga miskin atau pembangunan fisik, tetapi harus dengan menebar investasi pada penguatan kapasitas SDM dan kebijakan yang lebih populis, yang memungkinkan warga, khususnya orang miskin mempunyai ruang, akses dan kontrol secara memadai. Demokrasi (partisipasi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, pengakuan hak-hak sipil dan penegakan hukum secara adil) tentu saja akan membuka ruang dan kesempatan bagi proses belajar, menciptakan interaksi atau hubungan antara pemerintah dengan warga miskin secara lebih manusiawi dan setara, membangkitkan kesadaran kritis dan kekuatan kolektif warga miskin, membuka kesempatan akses politik bagi kaum miskin, membuat pejabat publik lebih bertanggung jawab, responsive dan representatif, mengurangi praktik-praktik kebocoran dalam alokasi dana yang memungkinkan program lebih tepat sasaran untuk kaum miskin. Proses kebijakan yang lebih partisipatif dan responsif tentu memungkinkan lahirnya kebijakan yang relevan dengan kebutuhan dan kepentingan orang miskin, bukan sekedar kebijakan yang bias preferensi elit.

3. SIMPULAN

Kesadaran untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara arif mulai berkembang, sejak masyarakat dunia mulai melihat dan merasakan suatu kenyataan, bahwa eksploitasi dan ekspansi kapitalisme dengan penggunaan teknologi moderen telah menimbulkan kerusakan-kerusakan terhadap ekosistem lingkungan lokal.

Berangkat dari realitas demikian itu, maka secara mendasar semua gagasan di Negara berkembang sat ini akan berputar disekitar isu-isu survival, yang muaranya adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara arif menurut persepsi masyarakat lokal. Dengan demikian, bangsa-bangsa miskin termasuk Indonesia harus segera memulai merumuskan bentuk kearifan baru dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alamnya.

Dalam konteks itu, suatu Negara (daerah) hanya bisa relevan kehadirannya jika ia mampu merumuskan gagasan untuk mempertahankan hak warganya yang memungkinkan (terutama warga miskin) mempunyai ruang, akses dan kontrol dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam lokalnya. Penerapan prinsip Tata Kepemerintahan Lokal Demokratis (partisipasi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, pengakuan hak-hak sipil dan penegakan hukum secara adil) tentu saja akan membuka ruang dan kesempatan bagi proses belajar, menciptakan interaksi atau hubungan antara pemerintah dengan warga miskin secara lebih manusiawi dan setara, membangkitkan kesadaran kritis dan kekuatan kolektif warga miskin, membuka kesempatan akses politik bagi kaum miskin, membuat pejabat publik lebih bertanggung jawab, responsive dan representatif, mengurangi praktik-praktik kebocoran dalam alokasi dana yang memungkinkan program lebih tepat sasaran untuk kaum miskin.

Jika prinsip-prinsip Tata Kepemerintahan Lokal Demokratik tersebut diabaikan, maka akan sulit program-program pengelolaan wilayah pesisir dan laut mampu berkembang berdaya saing. Paling tidak, tumbuh sebentar, surut lagi, tumbuh dan surut lagi, sehingga tidak akan pernah terjamin keberlanjutan hidupnya. Ketika pengelolaan berbasis yuridis formal dengan pendekatan proyek yang karitatif terbukti gagal mengangkat neraca kehidupan rakyat ke kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri, serta terbukti tidak menjamin kelestarian sumberdaya alam, maka diperlukan review dan refleksi dengan penajaman untuk mengoptimalkan pendekatan Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM) melalui penerapan Tata Kepemerintahan Lokal yang Demokratis (TKLD).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, (2017), *Profil Penduduk Miskin di Indonesia*. Maret 2017, Berita Resmi Statistik, Jadwal Rilis; 2017-07-17.
- Beetham, D. (1996). *Theorising democracy and local government* inking, D. and stoker, G. (eds) *RethinkingLocal Democracy*. Macmillan, London 28-49.
- Cornwall, A. (2000) "*Bridging the gap? Good Governance' citizenship and rights.*" SIDA studies No. 2: 60-68.

- Cornwall, A. (2004), " Spaces for Transformation? Reflection on Issues of Power and Difference in Participation in Development, pp. 75-91, London: Zed Books.
- I Nyoman Oka dkk, 20005, CLAPP-Community –Led Assessment and Planning Process Menuju Kepemimpinan Rakyat, Mitra Samya-AusAID ACCESS.
- Rokhmin Dahuri, (2000) dalam M. Natsir Nessa, dkk. Prosiding Konperensi Nasional Pengelolaan Suberdaya Pesisir dan Laut Indonesia, hal 38).
- Solihin, D, (2004), Perencanaan Partisipatif – Presentation Transcript, Latihan Keuangan Daerah Angkatan X L, Diklat LPEM Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.